

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Lahirnya Putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 menuai berbagai respon berbentuk opini publik yang terekam dalam media sosial X. Dengan adanya algoritma dan fitur trending topik menjadikan media sosial X sebagai forum diskusi online yang dapat menjadi wadah bagi berbagai informasi dan opini publik. Jejak digital membantu publik dalam menemukan dan mengingat kembali memori lama tentang Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memiliki skema dan pola putusan yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut. Dengan dijadikannya media sosial X sebagai salah satu forum diskusi publik digital, publik membuat sebuah tagar yang menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia pasca dikeluarkannya Putusan MA dan Putusan MK tersebut, sehingga publik dapat dengan mudah mencari tahu perbincangan yang terjadi dalam media sosial tersebut hanya dengan mencari tagar tersebut sebagai sebuah kata kunci. Pelanggaran kekuasaan Joko Widodo dengan menggunakan Putusan MA dan Putusan MK yang saling terkognisi tersebut membuktikan bahwa narasi “*no viral no justice*” berlaku cukup efektif karena dengan adanya penolakan publik atas Putusan Mahkamah Agung yang menginstruksikan perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf d, instruksi yang diberikan Mahkamah Agung tidak diindahkan oleh KPU.

Dari analisis dalam rangkaian artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala dan wakil kepala daerah memiliki hubungan kognitif dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dua putusan tersebut ter kognisi dalam satu pola yang sama menjadi skema besar yang terorganisir sebagai upaya pelanggaran kekuasaan Joko Widodo. Upaya pelanggaran kekuasaan politik dinasti Joko Widodo dalam jabatan strategis politik mengakibatkan semakin menguatnya gelombang autokratisasi di Indonesia. Gelombang autokratisasi di Indonesia tidak hanya diakibatkan dari adanya upaya pelanggaran kekuasaan politik dinasti namun juga upaya inovasi otoritarian yang dilakukan pemerintah memiliki andil dengan memutuskan sebuah kebijakan yang dianggap publik melanggar etik konstitusi, sehingga menekankan bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami fase kemunduran demokrasi.

Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi turut serta dalam upaya penyelamatan demokrasi di Indonesia dengan adanya upaya pelanggaran politik dinasti Joko Widodo melalui kebijakan yang menjadi *fast track* bagi Gibran untuk mengikuti kontestasi pilpres dan disahkan oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Joko Widodo. Proses perekrutan akan kesadaran tugas dan fungsi, komitmen, serta sanksi tegas bagi aktor dalam insitusi politik untuk dapat meletakkan kepentingan dan keuntungan rakyat sebagai tujuan utamanya merupakan sebuah keharusan untuk dapat menyelamatkan sistem demokrasi di Indonesia.

